



Article history:

Submitted: 02-09-2026

Received: 02-09-2026

Revised: 10-09-2026

Accepted: 10-09-2026

Analisis Determinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jambi

Ogi Saputra*, Olin Anugra Heni, Julia Nur Aini

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

*Corresponding: ogisaputra0111@uinjambi.ac.id

Email: ogisaputra0111@uinjambi.ac.id, mak.olinanugraheni10@gmail.com, julianuraini284@gmail.com

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama kemandirian fiskal dalam pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap PAD Provinsi Jambi periode 2003–2025. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif kausal dengan data time series tahunan dari Badan Pusat Statistik dan instansi terkait. Analisis dilakukan melalui regresi linier berganda berbentuk logaritma. Hasil estimasi menunjukkan bahwa secara parsial jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan pengeluaran pemerintah signifikan tetapi bertanda negatif. PDRB, inflasi, dan PMA tidak signifikan pada taraf 5 persen. Secara simultan, kelima variabel berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan koefisien determinasi 98,25 persen. Temuan ini menegaskan bahwa PAD Jambi lebih peka terhadap perluasan basis demografis daripada terhadap ukuran output atau masuknya modal asing, sementara ekspansi belanja tidak secara otomatis menaikkan penerimaan sendiri. Pemerintah Provinsi Jambi perlu memperkuat administrasi pajak berbasis populasi, memperbaiki komposisi belanja, dan menautkan pertumbuhan ekonomi serta PMA ke objek PAD sesuai kerangka UU HKPD.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah; PDRB; inflasi; pengeluaran pemerintah; jumlah penduduk; PMA; kemandirian fiskal.

ABSTRACT

Local own-source revenue (PAD) is a key indicator of fiscal autonomy under regional decentralization. This study examines the effects of gross regional domestic product (GRDP), inflation, government expenditure, population, and foreign direct investment (FDI) on PAD in Jambi Province from 2003 to 2025. A causal quantitative design is applied using annual time-series data from Statistics Indonesia and related agencies. The analysis employs a double-log multiple linear regression model. Partially, population has a positive and significant effect on PAD, while government expenditure is significant but negative. GRDP, inflation, and FDI are insignificant at the 5 percent level. Simultaneously, the five variables significantly affect PAD, with an R^2 of 98.25 percent. The findings indicate that PAD in Jambi is more sensitive to the expansion of the demographic tax base than to output size or FDI inflows, and that larger public spending does not automatically raise own-source revenue. The Jambi Provincial Government should strengthen population-based tax administration, improve the composition of spending, and link economic growth and FDI to local tax objects within the framework of the HKPD Law.

Keywords: local own-source revenue; GRDP; inflation; government expenditure; population; FDI; fiscal independence.

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal memberi daerah kewenangan mengatur urusan pemerintahan, tetapi kewenangan itu hanya efektif apabila daerah memiliki kapasitas penerimaan sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator paling langsung dari kapasitas tersebut karena berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang

sah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Wahab, 2016). Daerah dengan kontribusi PAD yang rendah tetap dapat membiayai belanja melalui dana perimbangan, namun ruang diskresinya sempit dan ketergantungannya pada transfer pusat tetap tinggi (Setiawan et al., 2020; Yuliana & Asmara, 2024). Oleh karena itu, persoalan otonomi daerah pada akhirnya adalah persoalan kemampuan memobilisasi basis ekonomi lokal menjadi penerimaan fiskal.

Kondisi itu tampak jelas di Provinsi Jambi. Laporan realisasi Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2024 mencatat PAD sebesar Rp2,09 triliun, sementara pendapatan transfer mencapai Rp2,61 triliun. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah baru 44,21 persen, sedangkan transfer masih 55,31 persen. Pajak daerah mendominasi struktur PAD hingga 88,02 persen, tetapi realisasi PAD 2024 sedikit menurun dibanding 2023 (Pemerintah Provinsi Jambi, 2025). Pada agregat pemerintah daerah di wilayah Jambi, ketergantungan terhadap transfer bahkan lebih dalam. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi mencatat rasio kemandirian fiskal regional sekitar 20,47 persen, dengan dana transfer masih mendominasi pendapatan daerah hingga 79,29 persen (DJPb Provinsi Jambi, 2025). Temuan ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Jambi masih rendah dan pembiayaan pembangunan masih bertumpu pada transfer pusat (Irasriadipura et al., 2022; Sinaga & Nelvia, 2024).

Kerangka hukum penerimaan daerah memperkuat urgensi persoalan tersebut. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menempatkan PAD sebagai tulang punggung perimbangan keuangan. Kerangka itu kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang memperluas sumber pajak daerah, merestrukturisasi retribusi, dan menekankan sinergi kebijakan fiskal nasional. Namun, perluasan kewenangan legal tidak otomatis menaikkan PAD. Yang menentukan adalah basis pajak dan upaya pungutan: seberapa besar aktivitas ekonomi, penduduk, belanja publik, dan investasi benar-benar masuk ke objek pajak daerah (Ahmad, 2024; Yossinomita et al., 2024).

Secara teoretis, PAD merupakan fungsi dari kapasitas fiskal dan tax effort. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dipakai sebagai proksi basis ekonomi. Semakin besar output regional, semakin luas potensi pajak atas konsumsi, kendaraan, dan kegiatan usaha (Asdar & Naidah, 2020). Jumlah penduduk memperbesar subjek maupun objek pajak serta permintaan layanan yang dikenai retribusi, sehingga secara konseptual berpengaruh positif terhadap PAD (Kamila, 2016). Inflasi dapat menaikkan penerimaan nominal, tetapi sekaligus menekan daya beli dan kepatuhan wajib pajak jika tidak diimbangi pertumbuhan riil (Anin & Amarato, 2026). Pengeluaran pemerintah memiliki dua penafsiran yang bersaing. Pendekatan Keynesian memandang belanja sebagai instrumen permintaan agregat yang dapat memperluas aktivitas ekonomi dan, pada gilirannya, basis penerimaan. Hukum Wagner justru menekankan bahwa ekspansi belanja mengikuti pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kebutuhan pelayanan publik (Bahasoan, 2022). Karena belanja dan PDRB sering bergerak bersama, keduanya rawan multikolinearitas apabila dimasukkan dalam satu persamaan PAD. Selain itu, belanja konsumsi pemerintah yang tidak efisien dapat mendistorsi keputusan swasta dan tidak memperkuat produktivitas fiskal daerah (Nirola & Sahu, 2019). Penanaman Modal Asing (PMA) diharapkan menambah kapasitas produksi, lapangan kerja, dan transfer teknologi (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Khairifaldi et al., 2023). Dampaknya terhadap PAD, bagaimanapun, bergantung pada sektor tujuan investasi serta jeda waktu sampai nilai tambah tersebut menjadi objek pajak daerah (Nugroho et al., 2025).

Bukti empiris di Indonesia umumnya mendukung peran PDRB dan jumlah penduduk sebagai determinan PAD, sementara pengaruh inflasi, belanja pemerintah, dan investasi lebih beragam. Belanja daerah cenderung memperkuat PAD apabila dialokasikan pada pelayanan dan infrastruktur yang memperluas basis pajak; belanja rutin tidak selalu menghasilkan penerimaan tambahan (Asdar & Naidah, 2020). Untuk konteks Jambi, sebagian besar kajian justru menempatkan PAD sebagai variabel penjelas pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai variabel yang dijelaskan (Sinaga & Nelvia, 2024). Kajian yang meneliti determinan PAD pun sering memakai periode pendek, jumlah variabel terbatas, atau unit kabupaten/kota, sehingga belum menjawab secara memadai faktor apa yang membentuk PAD pada level provinsi dalam jangka panjang. Ada pula indikasi bahwa kenaikan PDRB tidak selalu sebanding dengan kenaikan PAD. Hal itu menandakan adanya jurang antara ukuran perekonomian dan kemampuan daerah memungut penerimaan sendiri (Sartika et al., 2026).

Kesenjangan penelitian terletak pada tiga hal. Pertama, masih terbatas studi determinan PAD Provinsi Jambi yang menggabungkan PDRB, inflasi, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan

PMA dalam satu model jangka panjang. Kedua, studi terdahulu jarang menafsirkan hasil sebagai elastisitas kapasitas fiskal, sehingga implikasi kebijakan sering berhenti pada pernyataan “berpengaruh signifikan”. Ketiga, struktur ekonomi Jambi yang bertumpu pada perkebunan dan sumber daya alam membuat tautan PDRB serta PMA ke PAD tidak otomatis. Nilai tambah sektor primer lebih banyak beririsan dengan dana bagi hasil dan transfer daripada dengan pajak daerah provinsi (Setiawan et al., 2020; Wahab, 2016). Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis determinan PAD Provinsi Jambi periode 2003–2025 dan menempatkan temuan dalam kerangka basis pajak serta kualitas belanja daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H1: PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Jambi.

H2: Inflasi berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi Jambi.

H3: Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Jambi.

H4: Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Jambi.

H5: PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Jambi.

H6: PDRB, inflasi, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan PMA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi Jambi.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh parsial dan simultan kelima variabel tersebut terhadap PAD Provinsi Jambi serta merumuskan implikasi kebijakan bagi penguatan kemandirian fiskal daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan kausal. Pendekatan kuantitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah menguji pengaruh variabel ekonomi tertentu terhadap PAD berdasarkan data numerik yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik (Sugiyono, 2017). Rancangan kausal dipakai untuk menaksir arah serta signifikansi hubungan antara PDRB, inflasi, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan PMA sebagai variabel independen terhadap PAD sebagai variabel dependen.

Objek penelitian adalah Pemerintah Provinsi Jambi. Unit analisis bersifat agregat provinsi, sehingga data yang digunakan adalah data time series tahunan, bukan data panel kabupaten/kota. Periode pengamatan mencakup tahun 2003 hingga 2025. Pemilihan periode panjang dimaksudkan agar dinamika fiskal daerah dapat diamati melewati beberapa episode kebijakan desentralisasi, fluktuasi harga komoditas, dan guncangan ekonomi, termasuk pandemi COVID-19. Seluruh data merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, publikasi keuangan daerah, serta instansi terkait yang memuat realisasi PAD, PDRB, inflasi, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan PMA. Definisi operasional variabel disusun sebagai berikut. PAD ((Y)) adalah seluruh penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Wahab, 2016). PDRB (X_1) merupakan nilai tambah bruto seluruh unit usaha di Provinsi Jambi dan dipakai sebagai proksi basis ekonomi daerah. Inflasi (X_2) diukur melalui laju perubahan tingkat harga umum tahunan. Pengeluaran pemerintah (X_3) adalah realisasi belanja Pemerintah Provinsi Jambi. Jumlah penduduk (X_4) adalah jumlah penduduk Provinsi Jambi pada akhir tahun. PMA (X_5) adalah realisasi penanaman modal asing di Provinsi Jambi sesuai kerangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Variabel penelitian dipahami sebagai atribut yang ditetapkan untuk dipelajari agar diperoleh informasi yang kemudian disimpulkan secara empiris (Sugiyono, 2017).

Untuk menstabilkan ragam data dan menafsirkan koefisien sebagai elastisitas, variabel bernilai uang serta jumlah penduduk ditransformasikan ke dalam logaritma natural. Spesifikasi log-log juga memudahkan perbandingan sensitivitas PAD terhadap perubahan relatif masing-masing determinan. Model regresi linier berganda yang diestimasi adalah:

$$\ln PAD_t = \alpha + \beta_1 \ln P P_t + \beta_2 \ln INF_t + \beta_3 \ln PDRB_t + \beta_4 \ln J P_t + \beta_5 \ln PMA_t + \varepsilon_t$$

Keterangan:

$\ln PAD_t$ adalah logaritma natural PAD pada tahun (t); $\ln P P_t$ logaritma natural pengeluaran pemerintah; $\ln INF_t$ logaritma natural inflasi; $\ln PDRB_t$ logaritma natural PDRB; $\ln J P_t$ logaritma

natural jumlah penduduk; $\ln PMA_t$ logaritma natural PMA; α konstanta; $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ koefisien regresi; dan ε_t residual. Koefisien β pada model ini menunjukkan persentase perubahan PAD yang berhubungan dengan perubahan 1 persen pada variabel bebas, dengan asumsi variabel lain konstan.

Estimasi dilakukan dengan metode kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Squares) berbantuan perangkat lunak EViews. Sebelum pengujian hipotesis, model diuji melalui uji asumsi klasik agar penaksir OLS tidak bias dan efisien. Uji normalitas residual menggunakan statistik Jarque–Bera. Uji multikolinearitas dilakukan melalui matriks koefisien korelasi antarvariabel independen, dengan ambang 0,85 sebagai indikasi hubungan yang terlalu kuat. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan pemeriksaan pola residual, sedangkan uji autokorelasi menggunakan statistik Durbin–Watson (Ghozali, 2013).

Pengujian hipotesis mencakup tiga prosedur. Uji t dipakai untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap PAD secara parsial. Uji F dipakai untuk mengetahui pengaruh kelima variabel independen secara simultan. Koefisien determinasi R^2 dipakai untuk mengukur proporsi variasi PAD yang dapat dijelaskan oleh model (Ghozali, 2013; Neolaka, 2014). Kriteria keputusan menggunakan taraf signifikansi 5 persen. Hipotesis nol ditolak apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Karena penelitian ini menggunakan data time series level, hasil OLS perlu dibaca dengan kehati-hatian. Variabel PAD, PDRB, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk pada umumnya mengandung tren. Apabila variabel tidak stasioner, regresi level berisiko menghasilkan hubungan semu meskipun R^2 tinggi. Keterbatasan ini menjadi catatan metodologis penelitian dan dasar saran pengujian lanjutan berupa uji akar unit serta model dinamis pada studi berikutnya.

HASIL

Uji normalitas residual dengan statistik Jarque–Bera menghasilkan nilai 1,669680 dan probabilitas 0,433944. Karena probabilitas lebih besar dari 0,05, residual model berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi (Ghozali, 2013). Uji multikolinearitas melalui matriks korelasi antarvariabel independen menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan variabel memiliki koefisien korelasi di bawah 0,85. Namun, korelasi antara pengeluaran pemerintah ($\ln PP$) dan PDRB ($\ln PDRB$) mencapai 0,895287. Nilai tersebut melampaui ambang 0,85 dan menandakan adanya multikolinearitas pada kedua variabel tersebut. Karena itu, koefisien $\ln PP$ dan $\ln PDRB$ harus ditafsirkan secara hati-hati.

Statistik Durbin–Watson sebesar 2,390920 tidak berada pada kisaran autokorelasi positif yang kuat. Pemeriksaan sebaran residual juga tidak memperlihatkan pola kipas yang sistematis, sehingga heteroskedastisitas tidak tampak dominan pada pemeriksaan grafis.

Tabel 1
Ringkasan Uji Asumsi Klasik

Uji	Statistik	Probabilitas/Nilai	Keputusan
Normalitas (Jarque–Bera)	1,669680	0,433944	Residual berdistribusi normal
Multikolinearitas	$r(\ln PP, \ln PDRB) = 0,895287$	$> 0,85$	Terdapat indikasi multikolinearitas
Autokorelasi (Durbin–Watson)	2,390920	—	Tidak terdapat autokorelasi positif yang kuat
Heteroskedastisitas	Pola residual acak	—	Tidak terdapat pola heteroskedastisitas yang jelas

Sumber: data olahan

Tabel 2 hasil estimasi regresi linier berganda dalam bentuk logaritma adalah sebagai berikut:

$$\ln PAD = -35,1669 - 0,0450 \ln PP + 1,4497 \ln INF - 0,0830 \ln PDRB + 5,3418 \ln JP + 0,0176 \ln PMA$$

Karena model berbentuk log-log, koefisien regresi merupakan elastisitas. Artinya, koefisien menunjukkan persentase perubahan PAD yang berhubungan dengan perubahan 1 persen pada variabel bebas, dengan asumsi variabel lain konstan. Konstanta tidak dimaknai sebagai “PAD turun 35,17 persen apabila seluruh variabel bebas sama dengan nol”, karena dalam model logaritma konstanta hanya menyesuaikan skala dan tidak memiliki arti kebijakan langsung.

Tabel 2
Hasil Estimasi Determinan PAD Provinsi Jambi

Variabel	Koefisien	t-statistik	Probabilitas	Keputusan pada $\alpha = 5\%$
Konstanta	-35,1669	—	—	Tidak diinterpretasi secara kebijakan
$\ln$ Pengeluaran Pemerintah	-0,0450	-2,7152	0,0147	Signifikan
$\ln$ Inflasi	1,4497	2,0574	0,0553	Tidak signifikan
$\ln$ PDRB	-0,0830	-1,4410	0,1677	Tidak signifikan
$\ln$ Jumlah Penduduk	5,3418	10,2088	0,0000	Signifikan
$\ln$ PMA	0,0176	1,1654	0,2599	Tidak signifikan
F-statistik	191,6020	—	0,000000	Signifikan secara simultan
R^2	0,982564	—	—	Model menjelaskan 98,25% variasi $\ln PAD$

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 2 bahwa koefisien pengeluaran pemerintah sebesar -0,0450 berarti, ceteris paribus, kenaikan belanja pemerintah 1 persen berhubungan dengan penurunan PAD sekitar 0,045 persen. Tanda koefisien ini negatif, sehingga tidak mendukung hipotesis bahwa ekspansi belanja secara otomatis menaikkan PAD. Koefisien inflasi sebesar 1,4497 berarti kenaikan inflasi 1 persen berhubungan dengan kenaikan PAD sekitar 1,45 persen. Elastisitas ini relatif besar secara numerik, tetapi tidak signifikan pada taraf 5 persen karena probabilitasnya 0,0553. Dengan demikian, pengaruh inflasi berada di ambang signifikansi 10 persen dan tidak dapat dinyatakan robust pada kriteria yang ditetapkan.

Koefisien PDRB sebesar -0,0830 berarti kenaikan PDRB 1 persen berhubungan dengan penurunan PAD sekitar 0,083 persen. Selain tidak signifikan, tanda koefisien ini berlawanan dengan harapan teoretis bahwa perluasan basis ekonomi menaikkan PAD. Hasil tersebut perlu dikaitkan dengan indikasi multikolinearitas antara PDRB dan pengeluaran pemerintah. Koefisien jumlah penduduk sebesar 5,3418 berarti kenaikan jumlah penduduk 1 persen berhubungan dengan kenaikan PAD sekitar 5,34 persen. Ini bukan kenaikan 534,18 persen. Elastisitas penduduk merupakan yang terbesar dan paling signifikan dalam model. Arah positif sesuai hipotesis bahwa perluasan populasi memperbesar subjek dan objek pajak serta retribusi daerah. Koefisien PMA sebesar 0,0176 berarti kenaikan PMA 1 persen berhubungan dengan kenaikan PAD sekitar 0,018 persen. Arah koefisien positif, tetapi pengaruhnya tidak signifikan secara statistik.

Berdasarkan Tabel 3 hasil uji t pada taraf signifikansi 5 persen, pengeluaran pemerintah signifikan terhadap PAD ($p = 0,0147 < 0,05$) dan jumlah penduduk signifikan terhadap PAD ($p = 0,0000 < 0,050$). Sebaliknya, inflasi ($p = 0,0553$), PDRB ($p = 0,1677$), dan PMA ($p = 0,2599$) tidak signifikan. Dengan demikian, H4 diterima. H3 diterima secara statistik, tetapi dengan tanda yang berlawanan dari yang dihipotesiskan. H1, H2, dan H5 ditolak pada $\alpha = 5\%$.

Tabel 3.
Ringkasan Uji t

Hipotesis	Variabel	Probabilitas	Keputusan	Keterangan
H1	$\ln$ PDRB	0,1677	Ditolak	Tidak signifikan; tanda negatif
H2	$\ln$ Inflasi	0,0553	Ditolak pada $\alpha = 5\%$	Mendekati signifikan pada $\alpha = 10\%$
H3	$\ln$ Pengeluaran Pemerintah	0,0147	Diterima secara statistik	Signifikan, tetapi tanda negatif
H4	$\ln$ Jumlah Penduduk	0,0000	Diterima	Positif dan signifikan
H5	$\ln$ PMA	0,2599	Ditolak	Tidak signifikan

Sumber: data olahan

Uji F menghasilkan F-statistik sebesar 191,6020 dengan probabilitas 0,000000. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05, H6 diterima. Secara bersama-sama, PDRB, inflasi, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan PMA berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi Jambi (Ghozali, 2013). Nilai R^2 sebesar 0,982564 menunjukkan bahwa 98,25 persen variasi $\ln PAD$ dapat dijelaskan oleh kelima variabel independen, sedangkan 1,75 persen sisanya dijelaskan oleh faktor di luar model. Faktor tersebut antara lain efektivitas pemungutan pajak daerah, struktur belanja, PMDN,

infrastruktur, kualitas kelembagaan, dan guncangan harga komoditas (Neolaka, 2014). Angka R^2 yang tinggi pada data time series yang mengandung tren harus dibaca bersama hasil diagnostik, khususnya indikasi multikolinearitas antara belanja pemerintah dan PDRB.

Secara ringkas, hasil empiris menunjukkan dua pola utama. Pertama, jumlah penduduk merupakan determinan parsial terkuat bagi PAD Provinsi Jambi. Kedua, ukuran ekonomi makro seperti PDRB dan PMA tidak terbukti signifikan, sementara belanja pemerintah signifikan tetapi bertanda negatif. Pola ini menjadi dasar pembahasan mengenai basis pajak demografi, kualitas belanja, dan tax effort daerah pada bagian berikutnya.

Pembahasan

Hasil simultan yang signifikan menunjukkan bahwa PAD Provinsi Jambi tidak dibentuk oleh satu determinan tunggal. PDRB, inflasi, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan PMA secara bersama-sama menjelaskan variasi penerimaan asli daerah. Temuan ini sejalan dengan kerangka desentralisasi fiskal yang menempatkan PAD sebagai hasil interaksi basis ekonomi, demografi, belanja publik, dan investasi (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). Namun, kekuatan penjelasan parsial tidak merata. Yang paling robust adalah jumlah penduduk, sedangkan PDRB dan PMA yang secara teoretis dekat dengan ukuran perekonomian tidak terbukti signifikan. Pola itu penting: pertumbuhan output dan masuknya modal asing belum tentu sama dengan peningkatan kemampuan daerah memungut PAD (Setiawan dkk., 2020; Sinaga & Nelvia, 2024).

Pengaruh positif dan sangat signifikan jumlah penduduk menguatkan argumen basis pajak demografi. Pertambahan penduduk memperluas konsumsi rumah tangga, objek kendaraan, permintaan perizinan, serta pemanfaatan layanan yang dikenai retribusi. Karena pajak daerah mendominasi struktur PAD Jambi, perluasan aktivitas yang mengikuti populasi lebih mudah masuk ke objek penerimaan daerah daripada fluktuasi nilai tambah sektor primer (Wahab, 2016; Pemerintah Provinsi Jambi, 2025). Hasil ini konsisten dengan studi yang menempatkan penduduk sebagai determinan PAD yang relatif stabil (Asdar & Naidah, 2020; Kamila, 2016). Elastisitas 5,34 memang tinggi secara numerik. Angka tersebut dapat dibaca sebagai indikasi bahwa PAD Jambi sangat peka terhadap perluasan basis demografis. Magnitudo itu, bagaimanapun, perlu ditafsirkan hati-hati. Dalam data time series, penduduk, PAD, dan belanja bergerak dalam tren yang sama sehingga elastisitas dapat membesar. Arah hubungan tetap dapat diandalkan; ukuran pastinya lebih aman dipahami sebagai bukti sensitivitas yang kuat, bukan sebagai multiplier kebijakan yang bersifat mekanis.

Pengeluaran pemerintah signifikan, tetapi bertanda negatif. Temuan ini menolak harapan sederhana bahwa semakin besar belanja, semakin besar PAD. Ada empat penjelasan yang saling menguatkan. Pertama, komposisi belanja lebih menentukan daripada ukurannya. Apabila belanja didominasi belanja pegawai dan belanja rutin, multiplikasi terhadap basis pajak daerah lemah. Yang memperluas PAD adalah belanja yang memperbaiki pelayanan, infrastruktur, dan kepatuhan wajib pajak, bukan belanja yang hanya membesar secara nominal (Nirola & Sahu, 2019; Asdar & Naidah, 2020). Kedua, terdapat kemungkinan simultisitas fiskal. Daerah yang PAD-nya lemah tetap menaikkan belanja dengan menumpuk transfer pusat. Dalam regresi level, pola itu dapat muncul sebagai hubungan negatif: belanja naik, tetapi PAD tidak mengikuti. Ketiga, korelasi $\ln P P$ dan $\ln PDRB$ sebesar 0,895 membuat koefisien belanja tidak stabil. Hukum Wagner menjelaskan kedekatan itu: ekspansi belanja sering mengikuti pertumbuhan ekonomi, sehingga belanja dan PDRB membawa informasi yang tumpang tindih (Bahasoan, 2022). Keempat, kualitas kelembagaan pemungutan pajak membatasi transmisi belanja ke PAD. Belanja yang tidak diikuti administrasi pajak yang efektif tidak otomatis menghasilkan penerimaan sendiri (Ahmad, 2024; Yossinomita dkk., 2024).

Tidak signifikannya PDRB, bahkan dengan tanda negatif, bertolak belakang dengan banyak studi yang menempatkan PDRB sebagai determinan positif PAD. Untuk Jambi, hasil ini lebih tepat dibaca sebagai persoalan tax effort dan struktur ekonomi, bukan sebagai bukti bahwa pertumbuhan tidak penting. PDRB Jambi banyak ditopang perkebunan dan sumber daya alam. Nilai tambah sektor tersebut tidak otomatis masuk ke pajak daerah provinsi dalam porsi yang sebanding, karena sebagian penerimaan sumber daya mengalir melalui bagi hasil dan transfer (Setiawan dkk., 2020; DJPb Provinsi Jambi, 2025). Kesenjangan antara pertumbuhan output dan pertumbuhan PAD juga telah dicatat pada konteks lokal Jambi: perekonomian dapat membesar lebih cepat daripada kemampuan

daerah memungut penerimaan sendiri (Sartika dkk., 2026). Ditambah multikolinearitas dengan belanja, efek murni PDRB menjadi sulit diisolasi. PDRB tetap relevan sebagai prasyarat kapasitas fiskal, tetapi dalam model ini pengaruhnya terserap oleh variabel lain dan tidak linier terhadap PAD.

Inflasi tidak signifikan pada taraf 5 persen, tetapi probabilitas 0,0553 menempatkannya di ambang 10 persen. Arah teoretis inflasi terhadap PAD memang tidak tunggal. Inflasi dapat menaikkan penerimaan nominal melalui penyesuaian harga, denda, dan nilai transaksi. Pada saat yang sama, inflasi menekan daya beli dan dapat menurunkan kepatuhan jika pendapatan riil masyarakat melemah (Anin & Amarato, 2026). Karena itu, inflasi tidak layak dijadikan instrumen peningkatan PAD. Yang diperlukan adalah kestabilan harga agar basis konsumsi yang menopang pajak daerah tidak tergerus.

PMA juga tidak signifikan meskipun koefisiennya positif dan sangat kecil. Hasil serupa sering muncul karena realisasi PMA bersifat lumpy, tertuju pada enklave sumber daya, dan memiliki jeda waktu sebelum menciptakan objek pajak daerah (Khairifaldi dkk., 2023; Nugroho dkk., 2025). Investasi asing dapat menaikkan PDRB, lapangan kerja, atau ekspor tanpa segera memperbesar pajak kendaraan, retribusi pelayanan, atau pajak konsumsi daerah. Dengan kata lain, PMA lebih dekat ke perluasan kapasitas produksi daripada ke perluasan tax handle pemerintah provinsi dalam jangka pendek.

Secara keseluruhan, hasil Jambi memperkuat tesis bahwa kemandirian fiskal daerah ditentukan oleh kemampuan mengubah aktivitas penduduk menjadi penerimaan, bukan semata oleh ukuran ekonomi makro. Ketergantungan pada transfer tetap tinggi meskipun PDRB dan investasi bergerak (Irasriadipura dkk., 2022; DJPb Provinsi Jambi, 2025). Implikasinya, kebijakan peningkatan PAD tidak boleh berhenti pada slogan “genjot belanja”, “kejar pertumbuhan”, atau “undang PMA”.

Implikasi kebijakan yang lebih operasional adalah sebagai berikut. Pertama, Pemerintah Provinsi Jambi perlu memperlakukan pertumbuhan penduduk sebagai potensi fiskal yang harus diikat ke administrasi penerimaan. Langkah konkretnya meliputi pemutakhiran data wajib pajak, digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, serta perluasan objek yang sah sesuai UU HKPD, khususnya instrumen yang terkait konsumsi, kendaraan, dan pelayanan. Kedua, evaluasi belanja harus bergeser dari soal besaran ke soal komposisi. Prioritas perlu diberikan pada belanja yang memperbaiki kemudahan membayar pajak, kualitas layanan perizinan, dan infrastruktur yang menaikkan aktivitas kena pajak. Belanja yang membesar tanpa tautan ke basis PAD berisiko hanya memperbesar ketergantungan pada transfer. Ketiga, pertumbuhan PDRB dan realisasi PMA harus dihubungkan dengan objek penerimaan daerah. Fasilitasi investasi perlu disertai ketaatan perizinan, integrasi data usaha, dan pemetaan potensi pajak daerah di sektor yang selama ini “kaya output tetapi miskin PAD”. Keempat, inflasi cukup dipantau sebagai risiko daya beli, bukan sebagai tuas penerimaan. Kelima, karena pajak daerah sudah mendominasi PAD, strategi yang paling menjanjikan adalah menaikkan tax effort atas basis yang sudah ada, bukan semata menambah jenis pungutan baru yang secara administratif lemah (Wahab, 2016; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022).

SIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh PDRB, inflasi, pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan PMA terhadap PAD Provinsi Jambi periode 2003–2025. Secara simultan, kelima variabel berpengaruh signifikan terhadap PAD. Nilai R^2 sebesar 0,982564 menunjukkan bahwa model menjelaskan 98,25 persen variasi PAD, sedangkan 1,75 persen sisanya dipengaruhi faktor di luar model, seperti efektivitas pemungutan pajak, struktur belanja, PMDN, infrastruktur, dan guncangan komoditas.

Secara parsial, jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dengan elastisitas tertinggi. Temuan ini menegaskan bahwa perluasan basis demografis lebih mudah masuk ke objek pajak dan retribusi daerah daripada fluktuasi ukuran ekonomi makro. Pengeluaran pemerintah juga signifikan, tetapi bertanda negatif. Dengan demikian, ekspansi belanja tidak secara otomatis menaikkan PAD. PDRB, inflasi, dan PMA tidak signifikan pada taraf 5 persen. Inflasi hanya berada di ambang signifikansi 10 persen, sedangkan PDRB bahkan bertanda negatif. Hasil tersebut menolak anggapan bahwa pertumbuhan output dan masuknya modal asing dengan sendirinya memperkuat kemandirian fiskal.

Kesimpulan kebijakan yang merangkum temuan empiris adalah sebagai berikut. PAD Jambi lebih ditentukan oleh kemampuan daerah mengubah aktivitas penduduk menjadi penerimaan daripada

oleh ukuran PDRB, PMA, atau volume belanja. Tanda negatif belanja menunjukkan persoalan komposisi dan kualitas pengeluaran, bukan sekadar kekurangan anggaran. Tidak signifikannya PDRB dan PMA menunjukkan jurang antara basis ekonomi dan tax effort daerah, terutama pada struktur perekonomian yang bertumpu pada perkebunan dan sumber daya alam.

Saran bagi Pemerintah Provinsi Jambi bersifat operasional. Pertama, tempatkan pertumbuhan penduduk sebagai potensi fiskal melalui pemutakhiran data wajib pajak, digitalisasi pembayaran, dan perluasan objek pajak serta retribusi yang sah sesuai UU HKPD. Kedua, geser evaluasi belanja dari soal besaran ke soal komposisi. Prioritas perlu diberikan pada belanja yang memperbaiki pelayanan perizinan, kemudahan membayar pajak, dan infrastruktur yang menaikkan aktivitas kena pajak. Ketiga, tautkan pertumbuhan PDRB dan realisasi PMA ke objek penerimaan daerah melalui ketaatan perizinan, integrasi data usaha, dan pemetaan potensi pajak pada sektor yang selama ini kaya output tetapi miskin PAD. Keempat, perlakukan inflasi sebagai risiko daya beli, bukan sebagai instrumen peningkatan penerimaan. Kelima, karena pajak daerah sudah mendominasi PAD, strategi yang paling menjanjikan adalah menaikkan tax effort atas basis yang sudah ada.

Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan regresi time series level tanpa uji stasioneritas, adanya multikolinearitas antara pengeluaran pemerintah dan PDRB, serta belum dipisahkannya komponen PAD maupun jenis belanja. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan uji akar unit dan estimasi ARDL atau kointegrasi, memisahkan belanja modal dari belanja rutin, menambahkan PMDN serta indikator kelembagaan pemungutan pajak, dan menguji komponen PAD secara terpisah agar tautan kebijakan lebih tajam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, U. S., 2024. Analisis kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 49–67. <https://journal.yibri.id/index.php/brijief/article/view/49>
- Anin, V. B., Amarato, D., 2026. Analysis of the impact of inflation on poverty levels in East Nusa Tenggara post the COVID-19 pandemic (2020–2024). *Jurnal Maneksi*, 15(1). 227-232. <https://doi.org/10.31959/jm.v15i1.3536>
- Asdar, & Naidah. 2020. The effect of government expenditure and number of population on Makassar City regional original income. *Balance: Jurnal Ekonomi*, 16(1), 61-85. <https://doi.org/10.26618/jeb.v16i2.4551>
- Bahasoan, A. N., 2022. *Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah*. Qiara Media.
- DJPb Provinsi Jambi. 2025. *Pernyataan resmi mengenai kemandirian fiskal daerah Provinsi Jambi*. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi.
- Ghozali, I., 2013. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irasriadipura, Rahayu, S., Junaidi, J., 2022. Pengaruh desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, efektivitas dan efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan indeks pembangunan manusia sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(2), 83. <https://doi.org/10.22437/jaku.v7i2.16267>
- Kamila, A., 2016. Pengaruh sektor pariwisata, produk domestik regional bruto (PDRB), tingkat investasi dan jumlah penduduk terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta. <https://eprints.ums.ac.id/43420/>
- Khairifaldi, A., Putri, A., Wardasari, D., Ainiyyah, F., Istiazah, N. C., 2023. Pengaruh penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi 34 provinsi di Indonesia tahun 2023. *Kampus Akademik Publishing*, 3(2), 1034-1046 <https://doi.org/10.61722/jaem.v3i2.11054>
- Neolaka, A., 2014). Metode penelitian dan statistik. Remaja Rosdakarya. Nirola, N., & Sahu, S. (2019). The interactive impact of government size and quality of institutions on economic growth: Evidence from the states of India. *Heliyon*, 5(3), e01352. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01352>
- Nugroho, A. E., Canon, S., Payu, B. R., 2025. Pengaruh PMDN, PMA, dan Indeks Daya Saing Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi di Indonesia. *Jurnal Economic Resources*, 8(2), 1406-1416

- Pemerintah Provinsi Jambi. 2025. *Laporan realisasi anggaran pendapatan daerah tahun 2024*.
- Sartika, A., Rosmeli, Suri, P. I., 2026. Analisis efektivitas dan kontribusi sub sektor pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Jambi. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(2), 256-266. <https://doi.org/10.23969/jp.v11i02.44724>
- Setiawan, R., Yuliusman, Y., Yetti, S., 2020. Analisis kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2015-2019. *Jambi Accounting Review*, 1(3), 310–319. <https://doi.org/10.22437/jar.v1i3.13624>
- Sinaga, N., Nelvia, R., 2024. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 5(6), 374–383. <https://doi.org/10.38035/jimt.v5i6.2648>
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Wahab, A., 2016. Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jambi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 1(3), 39–40. <https://doi.org/10.22437/jaku.v1i3.3173>
- Yossinomita, Y., Haryadi, H., Nainggolan, S., Zulfanetti, Z., 2024. Pertumbuhan ekonomi dan perpajakan. Penerbit Widina.
- Yuliana, A. S., & Asmara, K. (2024). Pengaruh PAD, dana perimbangan, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah. *Jambura Economic Education Journal*, 6(2), 540–551. <https://doi.org/10.37479/jeej.v6i2.25189>